

12-31-2019

## Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Mengenai Fenomena Arab Spring dan “Teman Ahok”

Satya Anggara

*Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, satya.anggara@ui.ac.id*

Herdito Sandi Pratama

*Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, herditosandi@ui.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

---

### Recommended Citation

Anggara, Satya, and Herdito S. Pratama. 2019. Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Mengenai Fenomena Arab Spring dan “Teman Ahok”. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (December). 10.17510/paradigma.v9i3.241.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## MASYARAKAT JEJARING, MEDIA SOSIAL, DAN TRANSFORMASI RUANG PUBLIK: REFLEKSI MENGENAI FENOMENA *ARAB SPRING* DAN “TEMAN AHOK”

Satya Anggara dan Herdito Sandi Pratama

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;  
satya.anggara@ui.ac.id, herditosandi@ui.ac.id

DOI: 10.17510/paradigma.v9i3.241

### ABSTRACT

The information technology revolution has produced a network society that Manuel Castells characterizes as *space of flows* and *timeless time*. Network logic is inclusive to various dimensions of human life and is exclusive to those who are not involved in the network. In a network society the public sphere is expanding, dynamic and increasingly interactive due to the Internet mediation. The transformation of public space also spreads political power amongst the public. An example is the birth of various volunteer groups that have extensive networks in a short time without face-to-face processes. There have also been various attempts to embrace as many groups as possible as reflected in the change of campaign strategy and regeneration by political parties. In addition, the democratization in the Arab countries (*Arab Spring*) was possibly happened due to the transmission of information and public consolidation which was facilitated by information and communication technology (ICT), specifically social media. The questions are, how far is the role of social media as a forum for political interaction in the network and what kind of interaction that will be formed? This article uses a qualitative approach that contains analytical description that will reflect the transformation of public space in a network society, particularly on how the democratization faces opportunities as well as challenges in its process and the role of social media in the new political interaction. Focusing on Castells' theory of network society, this article shows that the transformation of public space at the political level has led to an existential crisis that engulfed most of political actors at this time.

### KEYWORDS

*Arab Spring*; Network Society; Social Media; Teman Ahok.

### ABSTRAK

Revolusi teknologi informasi telah menghasilkan masyarakat jejaring yang oleh Manuel Castells dicirikan sebagai *space of flows* dan *timeless time*. Logika jejaring bersifat inklusif pada berbagai dimensi kehidupan manusia sekaligus eksklusif terhadap mereka yang tidak terlibat dalam jaringan. Pada masyarakat jejaring, ruang publik meluas, dinamis, dan semakin interaktif berkat mediasi Internet. Transformasi ruang publik turut menyebarkan

kekuasaan politis kepada publik. Sebagai contoh adalah kelahiran bermacam kelompok relawan yang memiliki jaringan luas dalam waktu singkat tanpa proses tatap muka. Terdapat juga berbagai upaya untuk merangkul sebanyak mungkin kelompok masyarakat yang tergambar pada perubahan strategi kampanye dan kaderisasi dari partai politik. Selain itu, peristiwa demokratisasi Arab (*Arab Spring*) juga dimungkinkan untuk terjadi berkat transmisi informasi dan konsolidasi publik dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam hal ini media sosial. Pertanyaannya, seberapa jauh peran media sosial sebagai wadah interaksi politis dalam jaringan dan seperti apa pola interaksi yang akan terbentuk pada masa depan? Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskripsi-analitis untuk merefleksikan transformasi ruang publik dalam masyarakat jejaring khususnya pada bagaimana demokratisasi menghadapi peluang sekaligus tantangan di dalamnya dan peran media sosial dalam interaksi politis baru. Dengan berpusat pada teori Castells mengenai masyarakat jejaring, artikel ini hendak menunjukkan bahwa transformasi ruang publik dalam tataran politis telah menyebabkan krisis eksistensial yang melanda hampir semua pelaku politis pada masa ini.

#### KATA KUNCI

*Arab Spring*, Masyarakat Jejaring, Media Sosial, Teman Ahok.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Revolusi Teknologi, yang geliatnya dimulai pada 1970 berkat invensi mikroprosesor, menandai era baru yang menjadi lompatan besar dalam sejarah peradaban manusia semenjak Revolusi Industri (Castells 2010 [1996], 28–53). Revolusi itu berbeda dari yang sebelumnya karena bukan hanya terjadi perkembangan teknologi yang membuat kerja manusia menjadi lebih efisien, tetapi juga perubahan paradigma kerja manusia, kecepatan perkembangan teknologi secara eksponensial, pergeseran modal serta fokus utama teknologi dari produk fisik menuju informasi, sampai konsep ruang dan waktu yang menjadi lingkungan hidup manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sehari-hari (Sheppard 2002, 307–330).

Di tengah suasana semacam itu, struktur sosial dan ruang publik mengalami transformasi mendasar, ketika kehidupan manusia mau tidak mau terhubung di dalam jaringan global berbasis teknologi yang menghilangkan batas teritorial serta mengurangi secara signifikan waktu yang dibutuhkan di dalam proses interaksi. Konsekuensinya, kemungkinan interaksi dan perubahan strata sosial tumbuh secara signifikan. Sebuah berita dari suatu negara, misalnya, mungkin butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke negara tetangga sebelum era revolusi teknologi berbasis informasi. Sebaliknya, dewasa ini bahkan sebuah pernyataan dari seorang tokoh dapat tersebar ke segala penjuru duniapada saat yang sama, reputasinya naik atau turun dalam sekejap sehingga memengaruhi kariernya seumur hidup.

Keseluruhan peristiwa revolusi teknologi informasi dan efek domino yang muncul setelahnya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar bagi hampir segala bidang kehidupan manusia. Interaksi di dalam ruang publik yang berkembang dan membentuk jaringan raksasa adalah awal dari transformasi yang lebih besar pada tataran dunia politis dan relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Arus informasi yang membawa pengetahuan serta kebaruan secara masif nyata berandil besar dalam membentuk ulang semangat bernegara, berserikat, serta berkumpul. Antara elite dan elite, elite dan masyarakat, serta masyarakat dan masyarakat terjadi perubahan cara pandang secara hierarkis. Meskipun struktur ideologi dan kelembagaan

berikut dengan hiruk-pikuk yang terjadi di dalamnya masih terlihat sama, secara praktis jarak antara segala komponen dalam berinteraksi sudah tidak ada.

## 1.2 Masalah Penelitian

Ketika melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi yang membentuk masyarakat jejaring memengaruhi transformasi ruang publik dan politis dalam sebuah relasi kuasa, sekurang-kurangnya dua hal penting untuk dipertanyakan. Pertama adalah berapa jauh peran media sosial sebagai wadah interaksi dalam jaringan itu sendiri. Apakah sarana itu hanya sekadar media yang menghubungkan tiap orang, sebagai pusaran yang menyerap dan membagikan kekayaan informasi yang menjadi bahan bakar dalam perkembangan lanjutan, atau lebih daripada itu?

Kedua adalah pola interaksi yang terdapat di dalam masyarakat jejaring yang berserikat, berkumpul, serta berorganisasi secara politis. Apakah perbedaan kelompok menyebabkan lebih banyak interaksi yang bersifat hierarkis dan vertikal, atau justru malah meleburkan segala pihak di dalam jaringan ke dalam interaksi yang bersifat horizontal? Apakah perpindahan kelas menjadi sangat cair dan dinamis, atau justru semakin kaku dengan peluasan ruang interaksi dan jaringan? Upaya kami menjawab kedua pertanyaan besar itu akan membawa kita pada pemahaman tentang tantangan serta peluang yang mungkin tercipta dari kehadiran masyarakat jejaring dalam konteks demokratisasi.

## 1.3 Tinjauan Pustaka

Tidak banyak penelitian terdahulu yang menggunakan kata kunci *masyarakat jejaring* sebagai titik berangkatnya dalam konteks transformasi ruang publik dan demokratisasi. Kendati demikian, ketika kata kunci yang digunakan sedikit berbeda, terdapat beberapa penelitian yang memiliki persinggungan bahasan dengan tulisan ini. Penelitian dari Magnus T. Torfason dan Paul Ingram pada 2010, misalnya, menetapkan fokus penelitian pada keberadaan *intergovernmental organizations* (IGOs) dengan menyatakan bahwa IGOs memfasilitasi difusi demokrasi dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai demokrasi, sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, kepada negara-negara anggotanya dan juga menginterpretasikan informasi itu berdasarkan norma yang menjadi acuan masyarakat dunia (Torfason dan Ingram 2010, 355–377). Keduanya menelusuri perubahan situasi demokrasi di dunia pada periode 1815–2000. Hasil penelusuran itu kemudian menjadi dasar untuk membuktikan peran IGOs sebagai media penyebarluasan berbagai konsep demokrasi secara normatif.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Gerard van Bortel dan David Mullins pada 2009 lebih berfokus pada apa yang disebut *network governance*. Di sini, keduanya hendak membuktikan klaim atas *network governance* sebagai sarana dalam rangka menjaga partisipasi komunitas dan integrasi sosial. Keduanya mencurigai perubahan bentuk pemerintahan dan organisasi masyarakat (termasuk di dalamnya negara) dari yang bersifat vertikal menjadi horizontal, dengan asumsi bahwa hal itu dapat menciptakan: (1) situasi pembagian kekuasaan yang lebih setara; (2) keterpercayaan yang lebih tinggi antarpartisipan; serta (3) pengambilan keputusan secara kolektif merupakan janji yang mendahului bukti nyatapada tataran praktis (Bortel dan Mullins 2009, 203–219). Maka, dalam penelitian keduanya, fokus mereka adalah penelusuran kegagalan serta keberhasilan *network governance* itu sendiri melalui contoh berbagai komunitas pluralistis yang terdapat di sejumlah negara.

Era masyarakat jejaring berbasis TIK dengan potensi ketidakpastian di dalamnya tidak hanya dirasakan dalam konteks politis, khususnya mengenai proses demokratisasi, tetapi juga pada bidang kehidupan

lain seperti pola interaksi sosial. John Urry, dalam penelitiannya pada 2011, menganalisis bagaimana perkembangan TIK yang menginisiasi kemunculan pola interaksi baru di dalam masyarakat berdampak pada mekanisme tiap individu dalam membangun serta merawat jaringan sosialnya melalui serangkaian tindakan yang pada akhirnya membuat mereka mendefinisikan kembali konsep 'jauh' dan 'dekat' itu sendiri dalam konteks sosial (Urry 2011, 24). Mengutip Manuel Castells, Urry melihat bahwa jejaring telah menyusun morfologi sosial yang sama sekali baru sehingga difusi dari logika jejaring ke dalam kehidupan manusia secara substansial akan menyebabkan perubahan total pada operasionalisasi dan hasil yang dicapai dalam kegiatan produktif dan budaya masyarakat.

Terkait dengan kegiatan produktif, khususnya mengenai interaksi sosial dalam bidang ketenagakerjaan, Christoph Hermann pada 2006 telah menyoroti bagaimana jejaring tidak hanya mengubah cara berkomunikasi dan berkooperasi di antara para pekerja, tetapi juga mengenalkan metode kontrol dan pembagian kerja (Hermann 2006, 65). Para kapitalis memanfaatkan logika jejaring dalam rangka menciptakan kebingungan melalui kontradiksi antara pemahaman mengenai *kompetisi* dan *kooperasi* di antara para tenaga kerja. Melalui cara itu, yang diciptakan melalui sistem promosi jabatan dan kenaikan gaji berdasarkan performa secara individual ataupun kolektif, para kapitalis mampu memperoleh keuntungan besar sebab para pekerja akan mendorong diri mereka sendiri untuk memberikan performa terbaik sambil "mengalah" dengan tidak menuntut kompensasi yang besar (dalam bentuk gaji dan fasilitas lain) karena mereka takut bahwa para kapitalis akan dengan mudah mengganti mereka dengan tenaga kerja lain yang lebih "kompetitif"<sup>1</sup>, yang tersedia di dalam ruang besar bernama *jejaring*.

Simon Curtis, dalam penelitiannya pada 2010, menyoroti kemunculan kota global dan transformasi dalam sistem internasional. Dalam pandangannya, kemunculan kota global menghadirkan pertanyaan fundamental bagi para peneliti di bidang hubungan internasional mengenai hakikat dari objek disiplinnya. Lebih lanjut, Curtis menunjukkan bagaimana pertimbangan tentang hubungan historis antara kota dan negara dapat memberikan petunjuk tentang perubahan sistem internasional yang sedang berlangsung. Selain itu, Curtis juga menekankan betapa pentingnya kota global dalam proses globalisasi, karena menyediakan tulang punggung material dan infrastruktur bagi lalu lintas global serta lokasi fisik yang memfasilitasi fungsi perintah dan kendali atas ekonomi global yang terdesentralisasi (Curtis 2011, 1923). Penelitian Curtis itu, dengan kata lain, dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan, kepada peneliti di bidang hubungan internasional, betapa banyak asumsi dasar mereka yang sudah tidak stabil lagi sehingga perlu perbaikan.

Dwayne Winseck dalam penelitiannya menyoroti bagaimana dominasi ekonomi, dalam era globalisasi yang ditunjang oleh kebijakan telekomunikasi internasional, tidak serta-merta menjadikan satu negara hegemon tunggal. Para pemerhati, seperti yang dikutip oleh Winseck, melihat bahwa globalisasi ekonomi dan kebijakan liberalisasi Internet telah menata ulang dunia berdasarkan citra Amerika Serikat. Peran dominan perusahaan besar, seperti Amazon, Apple, Facebook, dan Google, menurut mereka, juga telah menunjukkan bagaimana Amerika Serikat menciptakan imperialisme baru berbasis Internet. Winseck, sebaliknya, melihat bahwa kendati para pemain besar itu mendominasi sejumlah pelayanan populer yang tersedia di Internet, kepemilikan dan kontrol atas unsur pokok dari infrastruktur Internet justru bergeser ke Uni Eropa dan negara-negara BRICS (*Brazil, Russia, India, China, and South Africa*). Hal itu menciptakan pandangan yang rumit mengenai kontrol hegemonik Amerika Serikat atas Internet dan struktur pengetahuan (Winseck 2017, 228). Winseck secara sederhana hendak menunjukkan bahwa pada era globalisasi berbasis Internet, hegemoni dan dominasi tidak lagi secara pasti menjadi milik aktor tunggal.

---

1 Dari segi biaya dan kinerja.

Temuan Winseck disokong oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh György Csomós pada 2013. Csomós dalam penelitiannya menyoroti temuan dari sejumlah peneliti terdahulu mengenai pergeseran fungsi kontrol dan perintah dari kota global yang selama ini menjadi pemimpin sekaligus penentu arah perkembangan ekonomi global ke kota baru yang berada di berbagai negara yang sedang mengalami perkembangan pesat, seperti India, Rusia, dan Brazil. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara itu telah mencapai tingkat yang menyamai negara maju yang telah lama mapan di posisinya, seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Kota baru itu kini telah menjadi tempat beroperasi sejumlah perusahaan besar berskala internasional seperti halnya kota global tradisional pada umumnya. Csomós, lebih jauh, juga menemukan penurunan jumlah penelitian mengenai Amerika Serikat kendati negara itu hingga kini masih menyandang status negara adidaya. Dengan menggunakan artikel dari Forbes "The Global 2000", Csomós memperbandingkan perubahan situasi yang terjadi di Amerika Serikat antara 2006 dan 2012 berikut sektor industri apa yang menjadi penyebab perubahan itu (Csomós 2013, 241). Penelitiannya, dengan kata lain, hendak menunjukkan bahwa perubahan peta kekuatan global dapat berimbas pada bentuk informasi yang akan semakin banyak diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi oleh masyarakat global pada masa depan.

Maka, dengan kaca pada apa yang telah ditemukan oleh sejumlah penelitian tersebut, artikel ini hendak menunjukkan apa yang terkandung di dalam korelasi antara konsep masyarakat jejaring dan proses demokratisasi dengan tidak lupa mempertimbangkan pengaruh kekacauan interaksi sosial yang dihasilkan pada berbagai bidang kehidupan pada kelancaran proses itu. Cakupannya tidak hanya bagaimana keduanya berkorelasi dalam berbagai peristiwa, tetapi juga dampak pascakorelasi yang mungkin terbentuk. Selain itu, berbeda dari sejumlah penelitian di atas yang menekankan pada aspek sosiologis dan komunal, artikel ini hendak mengupas aspek politis serta filosofis dari transformasi ruang publik serta demokratisasi sebagai akibat dari fenomena masyarakat jejaring. Secara politis, fenomena itu membuka babak baru sistem kekuasaan dalam masyarakat jejaring itu sendiri. Secara filosofis, keberadaan masyarakat jejaring dan fenomena difusi kekuasaan juga menimbulkan pertanyaan eksistensial, khususnya mengenai siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa artikel ini ingin menunjukkan bahwa transformasi ruang publik, sebagai akibat dari munculnya era masyarakat jejaring, bukan hanya menciptakan peran baru yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi pengawas orang lain dalam konteks kuasa (yang kini telah terdifusi), sebagai konsekuensi dari derasnya arus informasi dan kemungkinan penggalangan massa melalui jejaring (*network*), melainkan juga menciptakan kondisi kekacauan sebagai akibat dari krisis eksistensial yang mendera para pihak yang memiliki dua atau lebih peran atau identitas sosial, sehingga pada akhirnya masing-masing bukan hanya mengalami konflik internal dalam bentuk konflik nilai, tetapi juga konflik eksternal dalam bentuk konflik sosial dengan mereka yang memiliki nilai berbeda.

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Artikel ini secara keseluruhan dibangun dengan metodologi penelitian berbasis studi literatur, analisis data, serta temuan empiris di lapangan. Sebagai kerangka teoretis, sumber acuan utama adalah volume pertama dari tulisan Manuel Castells *The Rise of Network Society* yang merupakan bagian dari tiga seri bukunya *The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Bahan itu akan dijadikan perspektif utama yang ditopang oleh sejumlah artikel mutakhir, yang mengomentari, mengembangkan, serta mengkritisi lebih lanjut gagasan Manuel Castells.

Terkait dengan bahan yang dijadikan basis analisis, artikel ini akan mengangkat dua contoh kasus, yakni peristiwa Demokratisasi Arab (*Arab Spring*), serta gerakan relawan politis di Indonesia beberapa

tahun terakhir yang kemudian mendorong perubahan strategi partai politik. Melalui pendekatan itu, pada bagian akhir diharapkan kesimpulan dari teknik deskriptif-analitis yang menguraikan fenomena transformasi ruang publik dan masyarakat jejaring, khususnya pada ranah politis. Dalam kesimpulan itu juga akan terlihat bagaimana pola yang terbentuk di dalam dunia baru kemudian dijadikan bahan pertimbangan tambahan dalam memprediksi arah gerak politik dan demokrasi beberapa tahun ke depan.

### 1.5 Kerangka Teoretis

Teknologi adalah masyarakat, dan masyarakat adalah teknologi, demikian Castells menggambarkan relasi antara masyarakat dan teknologi yang mereka lahirkan (Castells 2010 [1996], 5). Apa yang diangkat sebagai makna di sini adalah kenyataan bahwa teknologi dan masyarakat sejatinya merupakan dualitas yang saling memengaruhi dan meninggalkan coraknya dalam entitas masing-masing. Untuk memahami bagaimana era masyarakat jejaring bekerja di atas fondasi TIK, sangat penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu masyarakat seperti apa yang sedang kita hidupi, termasuk di dalamnya proses sosial seperti apa yang sedang berjalan dan perubahan apa yang telah terjadi akibat tindakan sosial yang terencana (Castells 2000, 693).

Merunut ke belakang, tampak bahwa temuan dan revolusi terbaru pada tiap zaman dalam bidang teknologi selalu memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek hidup manusia sekaligus, secara perlahan tetapi pasti, mengubah cara hidupnya. Inovasi mesin uap akibat perubahan yang terjadi pada era revolusi industri, misalnya, telah memengaruhi begitu banyak bidang kehidupan yang berbeda. Di bidang ekonomi, jelas kehadirannya merupakan sinyal peningkatan produktivitas dan daya distribusi yang berimplikasi pada penurunan harga jual dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula halnya dari segi mobilitas, masyarakat dimampukan untuk melakukan perjalanan lebih jauh dalam waktu yang lebih singkat berkat kereta uap.

Dari ilustrasi sederhana di atas, masuk akal untuk mengatakan bahwa hanya pada masyarakat tertentu teknologi dapat berkembang dan pada koridor tertentu pula. Seperti yang kemudian ditekankan oleh Castells, dalam masyarakat yang mengedepankan semangat libertarian, terdapat tendensi keterbukaan diri terhadap kemungkinan lahirnya inovasi dan riset teknologi di tengah masyarakat negaranya (Castells 2010 [1996], 6). Sebaliknya, di negara teokratis atau diktatoris, kemungkinan semacam ini sukar terjadi mengingat keberadaan semacam kekangan kuat dan ketakutan akan perubahan yang dianggap mampu menggoyang tatanan yang mapan, entah itu agama atau sistem negara yang diatur oleh segelintir kecil tokoh (Castells 2010 [1996], 9–10).

Setelah ribuan tahun lamanya peradaban manusia menciptakan banyak sekali teknologi yang pada intinya berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan sebagai bagian dari budaya materialistik. Pada akhir abad ke-20, paradigma itu mulai bergeser seiring dengan era informasionalisme, atau yang secara lebih familiar kemudian disebut era teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada era itu, menurut Skippington, masyarakat mulai mengalihkan orientasinya ke arah pembagian dan penyebaran informasi dan pengetahuan di dalam jaringan secara fleksibel dan cepat yang menyebabkan individu di dalamnya menjadi saling bergantung. Dari sinilah kemudian pengembangan teknologi lebih ditujukan kepada revolusi untuk kian menyempurnakan proses penyebaran serta penyajian informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan pengetahuan bergerak dengan laju eksponensial, alih-alih linear. Ia menciptakan jaringan raksasa yang menghubungkan pengguna yang jumlahnya semakin hari semakin besar dari berbagai wilayah yang berjauhan, memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi besar-besaran, serta memungkinkan pula peran gandanya

sebagai alat dan proses untuk dikembangkan sekaligus oleh pengguna dan pengembang (Skippington 2016, 67–90).

Era masyarakat jejaring juga mengubah cara masyarakat dunia memandang kebijakan kunci, artinya semakin umum isu yang diangkat, semakin kuat kesadaran masyarakat pada tataran lokal untuk menonjolkan pengalaman partikularnya. Isunya di sini tidak lagi terbatas pada negara per negara sebab yang menjadi fokus orang adalah identitas bersama dan nilai yang melampaui batasan yang dibuat oleh masyarakat berbasis institusi. Dengan memusatkan perhatian pada nilai dan identitas bersama, pengetahuan yang berkembang dalam era masyarakat jejaring memiliki corak sistem yang lebih komprehensif karena turut memperhatikan hubungan antara budaya (*culture*) dan alam (*nature*) (Castells 2000, 694).

Keunikan lain dari revolusi yang disebabkan oleh TIK adalah teknologi itu tidak serta-merta mendorong upaya penghancuran seperti yang terjadipada masa lampau ketika dua kelompok masyarakat yang berbeda tingkatan teknologi bertemu dan menyebabkan—salah satunya—pemusnahan. TIK sebaliknya mampu menjaga agar kepingan-kepingan unik yang ada di dunia terhubung dan bahkan terbagikan serta mendapat perhatian. Alih-alih terjadi homogenisasi, masyarakat jejaring justru mengalami kebingungan yang salah satu penyebabnya adalah kegagalan menerima sedemikian banyaknya keragaman informasi dan peran di dalam jaringan. Kemunculan sistem teknologi terbaru, menurut Curtin dan Sanson, dapat ditelisik melalui dinamika yang terjadi pada bidang penemuan, pengembangan, serta difusi teknologi itu sendiri, yang di dalamnya termasuk pula efek sinergis antara beberapa teknologi kunci. Jadi, alih-alih ditentukan oleh lingkungan sosial, adakalanya induksi teknologi menjadi penyebab revolusi TIK itu sendiri. Baru kemudian, ketika sudah berbentuk sistem, teknologi itu dipengaruhi sepenuhnya oleh lingkungan, kultur, serta konteks historis suatu masyarakat (Curtin dan Sanson 2016, 241–252).

Kemampuan TIK untuk beradaptasi dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi sambil mempertahankan sistematika yang ada demi memberi ruang kepada daya kreatif dan logika untuk membuat teknologi jenis ini menjadi fleksibel dan sekaligus terstruktur. Keadaan itu jelas menguntungkan mereka yang berada di dalam jaringan sekaligus mempertegas eksklusivitas jaringan itu terhadap pihak luar karena keunikan jaringan ini yang membedakannya dari sistem di luarnya. Sejarah panjang Internet, sementara itu, membuktikan bahwa apa yang ada di dalam Internet hari ini merupakan hasil dari perwujudan visi penggunanya. Oleh karena itu, hanya mereka yang mampu mengorganisasi masyarakat melalui sistem teknologi terbaru akan meraup keuntungan finansial, kekuasaan, dan pengetahuan (Castells 2005, 3).

Menindaklanjuti bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat jejaring sebagai akibat dari inovasi dan revolusi yang terjadi pada TIK, terjadi restrukturisasi dan kompresi atas arti serta cakupan ruang dan waktu. Castells memberi pemahaman komprehensif atas kedua entitas itu dengan mengajukan gagasan mengenai apa yang ia sebut *space of flows* dan *timeless time*. Menurutnya, manusia hidup secara fisik dalam ruang dan waktu, dengan ruang berada pada posisi pengorganisasi waktu dalam masyarakat jejaring (Castells 2010 [1996], 407). Lingkungan sosial terbentuk atas transformasi ruang dan waktu yang disebabkan oleh kombinasi efek paradigma TIK dan proses sejarah masa kini. Dunia yang berbasis perspektif informasionalisme menyebabkan mobilitas dalam ruang fisik menjadi tidak begitu krusial sepertipada masa lalu. Unit-unit yang bekerja dalam sebuah sistem jaringan dapat tetap berhubungan jarak jauh pada saat yang sama, menyebabkan batasan ruang menjadi hilang. Wilayah-wilayah dalam dan antarnegara menjadi tidak lagi penting sebab akses komunikasi dan informasi bagi setiap orang dalam jaringan tidak lagi dibatasi oleh aturan otoritas tiap wilayah yang selama ini mengekang kemungkinan ini untuk terjadi.

Dari fenomena pertama ini, kemudian muncul *space of flows* yang menggantikan *space of place* yang selama ini mendefinisikan ruang sebagai ketetapan yang tidak dapat dipadatkan dan sudah memiliki batasan yang jelas secara kuantitatif. Dalam perspektif *space of flows*, ruang adalah arus besar yang di dalamnya



terdapat banyak sekali interaksi dan pertukaran informasi antar individu di dalam jaringan yang termediasi oleh teknologi. Ada semangat regionalisasi yang terselubung di sini, ketika orang berusaha memampatkan lingkungan global menjadi seolah-olah sebuah ruang kewilayahan yang terjangkau segala penjurunya oleh manusia (Castells 2010 [1996], 408–429).

Jika disadari, pemampatan juga berakibat pada konsentrasi lebih banyak lagi komponen dan variabel ke dalam proses produksi yang terjadi. Seperti diketahui, penambahan variabel yang perlu diperhitungkan selalu berdampak pada peningkatan risiko penyimpangan hasil akhir dari prediksi awal, yang artinya ketidakpastian di sini mengalami peningkatan signifikan. Padahal, jika menilik tujuan awalnya, keberadaan inovasi dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya untuk menurunkan ketidakpastian dan risiko itu sendiri.

*Space of flows* mengurangi ketergantungan serta arti penting dalam sebuah relasi antarkota dan antarwilayah yang berdekatan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan ekspansi global demi menciptakan kemungkinan interaksi baru, peniruan model unit kerja baru dalam sistem yang dinamis, serta perluasan dari sekadar pengamatan atas kelas dalam struktur masyarakat menjadi keseluruhan anggota dalam jaringan yang menghubungkan layanan mutakhir, pusat produksi, dan titik kumpul sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan. Model relasi semacam itu kemudian tereplikasi dalam konteks bernegara yang kini dipandang tidak lagi penting dalam berinteraksi.

Walaupun dalam logika spasial, lokasi aktual pusat yang berlevel tinggi (dalam arti pusat dari kemajuan dan kecanggihan) menjadi krusial untuk distribusi kekayaan dan kuasa, dan sistem baru yang dipelopori oleh kemajuan, TIK memperlihatkan bahwa keserbagunaan jaringan adalah yang terpenting. Kota global atau informasional bukanlah tempat, melainkan proses, ketika sentra produksi dan konsumsi layanan mutakhir terkoneksi secara global sekaligus menyebarkan lebih banyak informasi ke wilayah jauh yang selama ini tidak terjangkau. Pada hakikatnya, dalam *space of flows*, globalitas dan lokalitas bersandingan secara dinamis melalui interdependensi wilayah dan pelaku dalam jaringan sehingga diskontinuitas geografis terlahirkan dalam era ini lewat dispersi ruang.

Sementara itu, ketika merujuk pada apa yang ia sebut *timeless time*, Castells berteori bahwa manusia memiliki sejarah yang dibentuk oleh waktu. Waktu semula dianggap sebagai hal yang lokal, menentukan nasib manusia, absolut dan independen, serta hanya untuk menandai kejadian penting. Secara mekanis, waktu menentukan dunia industri dan kapital sebab modernitas dalam materialisme baru dapat direngkuh ketika dihasilkan dari dominasi waktu atas ruang dan masyarakat. Waktu juga dimaknai secara tradisional sebagai pengulangan dan penguasaan alam kehidupan (Castells 2010 [1996], 460–468).

Ketika konsep waktu kemudian dimasukkan ke dalam corak relatif masyarakat jejaring, logikanya menjadi terbalik. Ia menjadikan dunia kekal, tidak berekspansi, mandiri, acak tanpa siklus, serta menghilangkan sekat proses yang selama ini membuat dua fenomena terpisah dalam sebuah jangka waktu. Lewat bentuk baru itu, waktu dipampatkan pada hampir segala ranah hidup akibat kemampuan jejaring untuk menghubungkan dunia secara langsung. Proses yang serba langsung itu pada sisi yang lain memperbesar ketidakpastian dan risiko, terutama ketika membahas kesementaraan tren dan ideologi. Secara singkat, penyingkatan jangka waktu turut pula mendukung pemendekan usia sebuah paham, selera, dan sejenisnya. Apa yang kemudian harus dicermati sebagai gejala penting dalam sebuah kondisi seperti itu ialah tiap individu kini adalah penentu siklus hidup dan ritmenya tersendiri. Historisitas kehidupan tidak lagi sekuensial. Setiap orang mengambil potongan hidup yang dianggap penting dan membagikannya melalui perantara jaringan Internet ke dalam kesatuan kanal yang tidak pernah berakhir dan disaksikan oleh hampir semua orang.

## 2. ANALISIS

### 2.1 Anomali Demokratisasi Pasca-Arab Spring<sup>2</sup>

Seperti yang sudah diketahui umum, apa yang terjadi dalam kasus *Arab Spring* sejatinya adalah sebuah efek domino dari kasus bakar diri seorang pemuda bernama Muhammed Bouazizi di Tunisia. Ia mengalami frustrasi akibat kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, yang amat menyulitkannya dalam berusaha dan mengurus perizinan (Umar et al. 2014, 115). Tidak banyak yang menyangka bahwa kasus bakar diri yang berlangsung di depan Kantor Dewan Regional Sidi Bouzid itu akan menjadi gelombang demonstrasi besar di Tunisia yang menuntut revolusi politis, salah satunya adalah dengan menurunkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dari jabatannya (Rózsa et al. 2012, 3–4) yang dinilai telah berkuasa sangat lama dan menjalankan pemerintah yang penuh dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Efek domino belum berhenti sampai di sana. Gelombang protes meluas hingga ke negara lain di Semenanjung Arab, seperti Libya, Suriah, Mesir, dan Yaman. Gelombang revolusi berakibat lebih buruk dengan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa ribuan orang di tiap negara tempat revolusi itu. Fenomena gerakan massa, khususnya dari golongan muda yang berani menuntut rezim otoriter di negerinya untuk turun kendati mereka mungkin saja tewas di tangan militer yang memihak rezim. Kejadian itu merupakan sebuah gebrakan baru yang membawa Semenanjung Arab menuju tatanan kehidupan demokratis yang revolusioner.

Fenomena tersebut ditengarai oleh sebagian pengamat sebagai pengaruh langsung dari warga negara yang aktif memprakarsai gerakan politis lewat fasilitas media sosial yang memungkinkan arus pertukaran informasi dengan dunia internasional dan masyarakat lain di dalam negerinya, khususnya yang berkaitan dengan gagasan revolusi dan kesadaran akan pentingnya mengembalikan nilai-nilai humanisme serta demokrasi sejati ke dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya berupa arus pertukaran antara gagasan revolusioner dan pemberitaan kejadian di suatu negara saja yang menjadi informasi yang berseliweran di dalam jaringan media sosial, tetapi juga berbagai tanggapan dari masyarakat internasional yang sedikit banyak menjelma menjadi *transnational activism* yang mampu memberi tekanan pada pihak pemerintahan yang dinilai otoriter (Umar et al. 2014, 116).

Jika kita bergerak mundur sejenak ke tataran konseptual, demokrasi, menurut Jean Baechler (2001), pada hakikatnya tidak dapat begitu saja dipisahkan dari pembahasan mengenai hakikat dasar manusia serta sebab yang mendorongnya dalam berserikat, berkumpul, dan berpolitik. Hubungan antara manusia dan rezim politis tempatnya menjalani hidup adalah timbal balik, alih-alih satu arah. Demokrasi sebagai salah satu model rezim dan ideologi dalam berpolitik merupakan sebuah model yang terbangun menjadi ciri khusus yang melekat padanya. Kuasanya terletak pada kepemimpinan yang dibangun oleh kesadaran bahwa tujuan masing-masing hanya dapat dicapai dengan kebersamaan. Secara implisit terlihat bahwa sebenarnya fondasi demokrasi adalah keberadaan kontrak yang mengikat anggota dan segala kegiatan di dalamnya dengan syarat harus terjadi pertukaran adil yang melibatkan kesadaran penuh dan kebebasan dalam membuat persetujuan (Baechler 2001, 17–122).

Revolusi, sebagai sebuah gejala transformasi sosial, pada umumnya dicirikan sebagai sesuatu yang berlangsung dalam sebuah situasi pertentangan kelas (pendekatan marxis), yang lazimnya dipelopori oleh gerakan kiri atau persaingan antarelite yang berkuasa. Eisenstadt dalam kajiannya mengenai revolusi berpandangan bahwa perubahan yang revolusioner pada umumnya terjadi di negara kerajaan dan feodal-kerajaan serta dalam peradaban teologis tempat berkecamuk pertentangan antara tatanan transendensial dan

<sup>2</sup> Dimulai dari kasus bakar diri Bouazizi pada akhir 2010 hingga kudeta politis terhadap sejumlah pemimpin otoriter Timur Tengah sepanjang 2012 hingga 2013.

duniawi (Eisenstadt 1986, 1–12 serta 385–406). Beberapa kejadian revolusioner terbukti telah memengaruhi gambaran diri masyarakat menuju ke arah yang lebih modern. Sebuah pengalaman revolusioner juga lazim digunakan sebagai model bagi masyarakat lain yang belum mencapai titik yang sama dalam peradaban dan kebudayaannya.

Revolusi, terutama yang berkaitan dengan dunia politik, pada umumnya memengaruhi beberapa hal besar. Pertama, ia berdampak pada perubahan struktur dan hierarki kekuasaan dalam masyarakat lewat bentuk yang paling radikal dari hakikat serta fenomena perubahan sosial itu sendiri. Kedua, perubahan struktur dan hierarki pada umumnya digambarkan sebagai pemutarbalikan kelas yang dapat menyebabkan kelas paling atas seketika menjadi yang paling bawah. Ketiga, revolusi pada umumnya meresap hingga ke dalam tingkat kelembagaan hingga menyebabkan modernisasi. Keempat, pemutusan hubungan dengan apa yang telah dilalui secara total. Kelima, ada semangat ideologis ke arah kebangkitan.

Jika berkaca pada kenyataan dari sebuah revolusi politik, peristiwa demokratisasi menghasilkan konflik kelas antara penguasa otoriter yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan rakyat yang mendapat kesadaran baru atas pentingnya liberalisme dan revolusi demokrasi demi kehidupan bernegara yang lebih sehat. Kekuasaan otoriter di Timur Tengah sendiri pada umumnya dibangun dengan melibatkan oligarki yang sangat kuat antara militer, modal internasional, dan pemimpin politik. Entah ia merupakan sesuatu yang lahir dan berkembang secara alamiah, atau sebuah rancangan disengaja oleh segelintir orang. Yang jelas pada kasus *Arab Spring*, hampir semua negara di Timur Tengah mengalami proses demokratisasi signifikan yang ditandai dengan perombakan besar-besaran struktur kepemimpinan dan rezim yang berkuasa.

Kehadiran TIK dan kondisi masyarakat jejaring menjadi variabel yang memengaruhi situasi sosial-politik dalam kasus *Arab Spring* yang tidak hanya perlu dipandang dari gagasan dan informasi apa saja yang keluar-masuk negara-negara Arab yang mengalami revolusi demokrasi, tetapi juga pada benturan nilai dan ideologi yang terjadi dalam masyarakat ketika kedua variabel itu dihadirkan. TIK dan kondisi masyarakat jejaring adalah representasi dari nilai-nilai liberalisme dan keterbukaan jika mengutip apa yang Castells sampaikan. Seseorang menjadi bagian dari masyarakat jejaring yang berbasis TIK sekaligus juga mengindikasikan bahwa ia secara langsung maupun tidak langsung telah terpapar pada nilai-nilai itu. Baik mereka yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan dalam fenomena *Arab Spring* maupun yang memiliki agenda lain karena kepentingan pribadi atau kelompok secara parsial, rezim otoriter dengan cengkeraman dominasinya atas segala ranah kehidupan masyarakat adalah musuh bersama yang harus ditumbangkan.

Terjadi beberapa anomali sebelum, selama, dan setelah *Arab Spring* yang meninggalkan pertanyaan mengenai akibatnya: ternyata melenceng ke luar dari jalur yang diproyeksikan. Beberapa di antaranya adalah kegagalan di bidang ekonomi untuk mengalami demokratisasi dan justru memperkokoh kapitalisme dalam skala yang lebih besar. Selain itu, kebangkitan kembali berbagai gerakan islami yang tidak kompatibel dengan semangat demokrasi yang diangkat. Selanjutnya, pergolakan politik yang justru makin kacau akibat kekosongan singgasana kepemimpinan setelah kejatuhan pemerintahan otoriter. Terakhir, jurang ketertinggalan yang kian besar setelah demokratisasi (Umar et al. 2014, 120–129). Keadaan itu dapat dimaklumi sebab merupakan cerminan dari cara informasi dan gerakan sosial-politik berkembang dan tersebar dalam konteks ruang publik dari masyarakat jejaring yang bercirikan *Space of Flows* dan *Timeless Time*. Maka, perubahan revolusioner yang terjadi di berbagai negara Arab serta informasi yang keluar masuk bergerak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan amat bergantung pada kejadian di luar negeri; begitu juga sebaliknya, respon masyarakat dunia bergantung pada apa yang terjadi di berbagai negara Arab. Kesemuanya membentuk satu kesatuan ruang tunggal raksasa bernama dunia jejaring.

Konsekuensi dari situasi tersebut adalah waktu berkurang secara signifikan bagi masyarakat di berbagai negara Arab untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk mengkritisi serta memperbandingkan informasi yang mereka terima dan melakukan telaah secara mendalam mengenai dampak nilai baru yang mereka anut. Kondisi dunia memaksa mereka untuk mengambil keputusan segera: apakah mereka hendak melakukan revolusi (dalam arti menggulingkan rezim lama di negara mereka) atau tidak. Dampak itu tidak dapat dihindari ketika satu bagian dari masyarakat memutuskan untuk meleburkan dirinya dalam jejaring yang dimediasi oleh TIK.

Proses demokratisasi dalam konteks *Arab Spring*, menurut Yasmine (2015) dalam penelitiannya, berlangsung sejalan dengan sekularisasi negara dan wacana membangun negara yang demokratis, tetapi pada praktiknya dilakukan dengan ceramah agama sebagai motivator dan tempat ibadah sebagai titik berkumpul. Selain itu, menurutnya, partisipasi aktif dunia internasional tidak hanya menunjukkan bahwa TIK ternyata mampu membangun sebuah jaringan besar bagi masyarakat internasional dalam interaksi langsung, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa ternyata perbedaan ideologi bukanlah penghalang ketika mobilisasi diarahkan untuk menunjukkan suara prihatin atas situasi perpolitikan Arab (Yasmine 2015, 106–113). Kombinasi antara “perkawinan” semangat demokrasi dan nilai Islam, pada satu sisi, dan deras arus informasi ideologis dan dukungan moral dari dunia global yang dimediasi oleh TIK (khususnya media sosial) pada sisi lain, menjadikan gerakan masyarakat pada kasus Arab Spring tidak terbandung lagi untuk menggulingkan rezim politis yang berkuasa lama secara otoriter. Namun, di balik itu juga terdapat ketidakberesan, terutama dalam kecocokan nilai-nilai yang diusung oleh masyarakat Arab, yang di kemudian hari terbukti membuat konflik pasca-*Arab Spring* tidak kunjung usai.

Kendati pada awalnya berkesan seperti menyalahi semangat yang dibawa oleh *Arab Spring*, temuan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari motivasi yang begitu beragam para pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Keterhubungan masyarakat di berbagai negara Arab dengan dunia melalui TIK pada akhirnya menjadikan mereka bagian dari dunia. Konsekuensinya adalah mereka tidak dapat lagi menutup diri terhadap perkembangan nilai dan informasi yang terjadi di dalam jejaring. Perubahan akan terjadi kendati tidak secara niscaya menghapus keunikan mereka. Pada akhirnya, kondisi masyarakat jejaring memang memungkinkan heterogenitas dalam berbagai hal, termasuk motivasi pergerakan, untuk terpelihara selama dan sesudah *Arab Spring*. Seperti yang diramalkan oleh Castells, partikularitas bukannya mati, malah terus hidup dan membuat tiap gagasan atau motivasi pergerakan yang berbeda untuk bersaing satu sama lain menjadi yang paling menonjol. Krisis pasca-*Arab Spring* yang berkepanjangan di beberapa negara Arab merupakan konsekuensi logis dari ketidakjelasan visi masyarakat tentang masa depan negaranya setelah berhasil menumbangkan rezim otoriter yang menjadi musuh bersama.

Lebih parah lagi, masyarakat Arab pasca-*Arab Spring* juga belum betul-betul memahami dan mampu menjalankan peran barunya dalam suasana negara demokratis. Semua berlangsung demikian cepat dan dengan eskalasi di mana-mana sehingga mereka yang selama ini “terbiasa” berada dalam cengkeraman rezim otoriter menjadi bingung memikirkan apa yang hendak mereka lakukan setelah kebebasan mereka rengkuh. Apalagi kebebasan itu dikombinasikan dengan semangat patriarki dalam pemikiran Islam tradisional. Muhammad Al Mestiri, akademisi Universitas Zaytuna Tunisia, menyorotinya dalam sebuah diskusi akademis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada Oktober 2016,<sup>3</sup> misalnya, bagaimana Tunisia setelah *Arab Spring* masih sulit menyatukan semangat demokrasi yang cenderung sekuler dengan nilai-nilai pergerakan Islam yang memiliki sistemnya sendiri. Salah satu contoh kesulitan itu adalah *Imamah*, artinya perempuan tidak dapat dijadikan *Imam* (pemimpin) yang memerintah karena ruang politis sudah dikuasai oleh laki-laki.

---

3 Dikutip dari <http://s3pi.umi.ac.id/fenomena-pasca-arab-spring-beri-tantangan-baru/> yang diakses pada 5 Agustus 2019.

Semakin banyak perubahan dan hal baru yang dialami masyarakat Arab, semakin tidak terkendali kehidupan mereka setelah *Arab Spring*. Negara mereka dan dunia, pada saat yang sama, terus berproses dalam satu ruang besar bernama *space of flows*. Akibatnya, dari hari ke hari mereka tidak hanya perlu mengejar ketertinggalan dari apa yang telah terjadi, tetapi juga dari apa yang akan terjadi. Setelah *Arab Spring*, berbagai negara Arab masih disibukkan dengan masalah keamanan dan kedaulatan akibat kehadiran aktor eksternal yang menyulitkan kerja sama ekonomi, seperti pemberlakuan free trade area (FTA) dan pasar bersama (Falahi 2012, 189). Terdapat sejumlah upaya berbagai negara Arab seiring dengan informasi mengenai dunia luar melalui Internet. Liberalisasi masif masyarakat melalui pembukaan bioskop, destinasi wisata pantai, dan sebagainya yang diupayakan mirip dengan situasi di negara lain yang sudah lebih terbuka terhadap dunia luar.<sup>4</sup> Sayangnya, negara-negara itu, secara ideologis dan politis memang belum siap menerima gelombang perubahan yang sedang diupayakan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa era masyarakat jejaring dalam konteks *Arab Spring* tidak ubahnya seperti memasang mesin mobil balap pada mobil tua. Daya dorong yang begitu besar tidak diimbangi oleh kesiapan komponen lain dari mobil itu untuk mengikuti ritme dan dorongan yang begitu kencang.

*Arab Spring* dapat dianalogikan dengan kehancuran sebuah pintu bendungan bernama otoritarianisme di berbagai negara Arab yang bermula dari sebuah retakan kecil pada peristiwa bakar diri Muhammed Bouazizi. Cukup sebuah retakan kecil untuk menimbulkan banjir darah yang mengiringi proses revolusi di sana. Namun, retakan saja tentu tidak akan menyebabkan peristiwa semacam itu jika tidak disertai dengan akumulasi air yang berlangsung lama di dalam bendungan. Logika yang sama dapat digunakan untuk melihat latar belakang *Arab Spring* yang kesemuanya terangkum sebagai berikut.

Pertama, adanya persamaan kultur antara berbagai negara yang berakibat munculnya perasaan senasib dan sepenanggungan, yang pada akhirnya mendorong rakyat di satu negara untuk mengikuti contoh sukses negara lain yang telah terlebih dahulu mengalami revolusi. Kedua, ada semacam keengganan untuk terus hidup dalam penderitaan akibat keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga, semenjak kemerdekaan dari penjajah Barat, rakyat ternyata belum mengecap manisnya kemerdekaan yang sesungguhnya akibat kesejahteraan yang belum merata. Keempat, dan sebenarnya ini yang paling jelas, rakyat sudah jengah dengan budaya kerja pemerintahnya yang penuh dengan praktik KKN di hampir semua instansinya (Novandi 2013, 1–11).

Masih banyak perdebatan, terutama di sekitar pengaruh nilai dan praktik keagamaan yang dianut oleh rakyat, dalam membentuk kekuatan massa besar yang mampu memiliki hubungan kepercayaan yang tinggi sebagai modal serta identitas sosial, serta motivasi perjuangan yang tidak kenal surut. Islamisme sebagai ideologi pemersatu tidak dapat dibantah lagi merupakan ekspresi politis dan sosial untuk menyatukan umat Islam lintas negara. Mereka yang pada umumnya sudah pernah terhubung dalam gerakan keagamaan dengan segera dapat menyatu kembali dalam kasus *Arab Spring*. Islamisme jelas tidak dapat dilepaskan dari revolusi yang sedang berlangsung.

Dalam pada itu, islamisme berfungsi hanya sebatas perekat yang menyatukan masyarakat dalam satu gerakan massa tunggal dan masif yang berfokus pada upaya menggulingkan rezim yang berkuasa. Untuk menciptakan koordinasi di sepanjang pergerakan, jejaring menjadi sarana yang krusial. Jejaring mentransmisi informasi kepada setiap komponen masyarakat di negara-negara Arab yang terdampak *Arab Spring* sambil menjadi media yang mengomandoi pergerakan. Dengan demikian, setiap usaha yang diciptakan tetap dapat berada pada koridor yang semestinya dan bukan memperkuat kuasa dari rezim otoriter yang sedang mereka

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/tujuh-tahun-turbulensi-demokratisasi-di-timur-tengah/> yang diakses pada 16 Agustus 2019.

tentang. Tentu pada kenyataannya, setelah *Arab Spring*, kondisi sosial-politis tidak secara niscaya membaik dan lebih demokratis bagi segala pihak.

Masalah difusi nilai-nilai demokrasi berbasis liberalisme yang belum terlaksana pada tiap individu dapat dikatakan sebagai akibat dari orientasi kehidupan bermasyarakat bangsa Arab yang memang pada dasarnya berbasis komunitas alih-alih individu. Keadaan itu terlihat, misalnya, dari tradisi yang dipertahankan sekuat tenaga oleh keturunan Arab di luar negerinya, yang dipelihara di dalam komunitas imigran kendati anggotanya juga sangat terbuka terhadap kebudayaan Barat.<sup>5</sup> Orientasi kehidupan berbasis komunitas ini juga terlihat dari penamaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Nama seseorang senantiasa mencerminkan tiga elemen penting dalam kehidupan masyarakat Arab, yakni sanak keluarga, rumah, dan agama. Kuatnya orientasi ini dalam kehidupan masyarakat Arab menyebabkan pengertian masyarakat jejaring dalam konteks masyarakat Arab tidak dapat serta-merta direduksi pada skala individu sebagai unit paling kecil penyusunnya. Masyarakat Arab yang berjejaring adalah kumpulan komunitas bukan individu. Satu hal penting yang perlu dicatat dalam memahami model masyarakat jejaring Castells adalah masyarakat jejaring merupakan kumpulan unit dasar di dalam jejaring dan bukan kumpulan individu di dalam jejaring.

Fundamentalisme dan primordialisme agama memang menjadi hambatan dalam menciptakan masyarakat jejaring di tanah Arab, seperti yang lazim dipahami sebagai kumpulan individu yang secara bebas dan setara mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan informasi. Hingga kini masyarakat Arab masih berproses untuk menjadi masyarakat jejaring dalam pengertian yang demikian, dan ini tercermin dari krisis yang masih terus terjadi. Kendati demikian, dalam pengertian terbatas, masyarakat Arab dengan kesadarannya mengenai dunia secara global dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide yang berasal dari luar menjadi pertanda bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat jejaring. Konflik yang terjadi juga menunjukkan keinginan mereka untuk lepas dari relasi sosial yang hierarkis dan cenderung menegasi keberadaan individu. Pada saat ini masyarakat Arab berada dalam periode peralihan menuju kehidupan masyarakat global pada umumnya.

## 2.2 “Teman Ahok” dan Reformasi dalam Tubuh Partai Politik

Tidak pernah ada yang menyangka bahwa berawal dari usaha lima orang anak muda berusia 23–25 tahun (pada saat itu), sebuah gerakan kemasyarakatan bernama “Teman Ahok” terbentuk di tengah tingkat kepercayaan publik yang semakin merosot pada ranah perpolitikan di Indonesia akibat praktik KKN yang sudah membudaya. Dengan mengandalkan peran media sosial, gerakan itu dalam sekejap mampu menggalang, tidak hanya massa dalam tubuh gerakan ini sendiri, tetapi juga lebih dari satu juta KTP guna mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Meskipun pada akhirnya calon yang diusung maju melalui partai politik dan kemudian kalah, kehadiran “Teman Ahok”, menurut Ritaudin, tetap dipandang sebagai sinyal kuat demokrasi di Indonesia yang telah memasuki babak baru. Itu ditandai dengan kemampuan sebuah gerakan massa di luar partai politik untuk mengusung calon pejabatnya (Ritaudin 2016, 30–56). Melihat capaian mereka dalam waktu singkat, serta ketidakmampuan mesin partai politik untuk menyamai apa yang diraih para relawan itu, gerakan itu dapat dikatakan merupakan perwujudan dari kedongkolan masyarakat yang menyaksikan jabatan publik diisi, lewat budaya oligarki yang sangat kental dalam tubuh parpol itu sendiri, oleh orang-orang yang mereka nilai tidak mampu melayani.

Kebanyakan relawan yang bergerak dalam “Teman Ahok” memang anak muda yang biasa disebut Generasi Y. Walaupun dianggap sebagai generasi yang masih sangat muda, mereka memiliki keistimewaan

5 Dikutip dari [http://misi.sabda.org/masyarakat\\_arab](http://misi.sabda.org/masyarakat_arab) yang diakses pada 16 Agustus 2019.

dengan tingkat literasi digital dan Internet yang paling tinggi, mereka sudah bersentuhan langsung dengan TIK dalam berbagai keperluan dan kesempatan sejak awal kehidupan mereka. Jumlah relawan dalam tubuh "Teman Ahok" dan satu juta lebih KTP yang terkumpul membuktikan bahwa kedekatan mereka dengan teknologi, terutama yang terkait dengan jejaring sosial, mampu mendobrak kemapanan elite parpol yang selama ini dianggap boleh berperilaku seenaknya dalam mengemban amanat karena ketiadaan pesaing dari luar sistem parpol dalam kompetisi meraih kekuasaan politis.

Bukan sekadar penghangat dalam konstelasi politis serta pemberi secercah harapan bagi figur pilihan rakyat yang muncul dan dinilai layak mendapat jabatan politis, kemunculan "Teman Ahok" lebih jauh lagi telah dipandang sebagai katalis dalam perwujudan konsolidasi, regenerasi, serta kaderisasi dalam tubuh parpol. Banyak parpol yang tidak ingin tamat riwayatnya mulai merapatkan barisannya: dengan mendamaikan dualisme kepemimpinan internal, merombak jabatan para petingginya dengan mengundang masuk tokoh eksternal, mengadaptasi TIK sebagai alat politis dalam menghubungkan mereka dengan konstituen secara lebih intim, hingga mempermudah dan membuat lebih menarik sistem rekrutmen mereka bagi generasi muda berusia di bawah 30 tahun.

Jika merunut beberapa tahun ke belakang, sejatinya sudah ada tanda-tanda perubahan strategi dan orientasi di tubuh parpol yang menyadari ketidakberesan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan jumlah "Golongan Putih" atau "Golput" pada setiap pelaksanaan pemilihan umum dari tahun ke tahun sebagai akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan publik pada parpol sebagai kelompok terorganisir yang melahirkan calon-calon politisi. Beberapa parpol tidak lagi hanya mengandalkan spanduk dan iklan di televisi sepanjang tahun politis sebagai media untuk meraup simpati masyarakat. Mereka, terutama partai-partai baru seperti Nasdem (Nasional Demokrat) dan Perindo (Persatuan Indonesia), bahkan sudah terjun ke lapangan dan membaurkan diri dalam aktivitas nyata bersama masyarakat seperti pembentukan UMKM, bantuan sosial, dan sekolah politis beberapa tahun sebelum datangnya tahun politis. Segala kegiatan ini, ditunjang pula oleh penguasaan para petinggi parpol itu atas media massa sebagai sarana dokumentasi dan penyebaran berita, nyatanya mampu berkontribusi kepada pembentukan massa pada level akar rumput, ditandai salah satunya dengan perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2014 yang di atas 6% (Mustofa 2013, 62–69).

"Teman Ahok" sebagai wujud relawan politis juga menyadarkan para elite politis bahwa mereka bukan hanya perlu menampilkan citra diri melalui informasi yang mereka salurkan di media massa seperti televisi dan surat kabar, melainkan juga pentingnya media sosial dan opini publik yang terbentuk di dalamnya. Alih-alih hanya mencekoki masyarakat dengan jargon politik dan kegiatan pencitraan yang mereka soroti, para elite juga merasa perlu memperhatikan dengan saksama apa yang didengungkan oleh masyarakat pada tataran akar rumput. Dengan kata lain, ada kesadaran akan pola komunikasi dua arah antara diri mereka dan konstituen yang tidak dapat lagi diabaikan seperti sebelumnya (misalnya pada era Orde Baru).

Tentu pembangunan citra dan popularitas parpol tidak melulu mengandalkan penguasaan atas media massa yang jamak dikenal. Parpol lama yang tidak mempunyai kekuatan di media massa sebagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang lebih banyak mengandalkan penguatan serta pengenalan identitas kepartaian (terutama ideologi) pada simpatisan lama dan baru lewat kegiatan sosial-kemasyarakatan, perluasan daerah yang mayoritas berisi massa dari tiap parpol, hingga penggunaan media sosial dan laman sebagai sarana alternatif untuk mengiklankan parpol. Bahkan ada parpol, seperti Golongan Karya (Golkar) yang memiliki kedua jenis modal (media massa dan simpatisan yang loyal) pada dirinya sehingga mampu terus mematenkan diri sebagai salah satu parpol besar meskipun telah berulang kali didera permasalahan yang berpotensi mengurangi tingkat keterpilihan mereka

di mata masyarakat, seperti Reformasi 1998, korupsi yang berulang kali menjerat kadernya, hingga dualisme kepemimpinan.

Formulasi strategi yang lebih berbeda diperlihatkan oleh salah satu parpol pendatang baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara terang-terangan mengklaim diri sebagai parpolnya anak muda dan kaum feminis yang terepresentasi dalam jajaran pengurus pusatnya yang didominasi oleh kaum perempuan dan laki-laki berusia di bawah 40 tahun. PSI sangat menitikberatkan pada penggunaan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas dan penggalangan dana, pengadaan acara berkumpul mingguan dalam bentuk *information session* mengenai parpol atau perpolitikan secara umum, serta pencitraan diri sebagai parpol yang cinta keberagaman dan membawa semangat perubahan lewat struktur kerja organisasi yang diklaim berbeda dari para pemain lama karena berlandaskan gotong-royong dan partisipasi secara sukarela. Sayangnya, pada Pemilu 2019, PSI gagal memenuhi ambang batas minimal untuk masuk Parlemen karena hanya memperoleh 2.650.361 suara atau 1,89% secara nasional.<sup>6</sup>

Dalam bentuk apa pun, baik gerakan relawan maupun parpol pada kenyataannya tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhannya akan strategi komunikasi yang menjangkau sampai ke segala penjuru dalam waktu singkat, murah, dan mudah. Era informasionalisme memberi kesadaran kepada mereka bahwa yang terpenting adalah bagaimana mengirimkan potongan berupa kesan-kesan baik mengenai kelompok mereka kepada masyarakat luas hingga ke tingkat akar rumput dengan harapan mereka akan mendapat simpati dan dukungan dalam memperjuangkan apa yang mereka usung dengan berkaca dari opini apa yang dibentuk oleh publik di media sosial. Dalam kacamata politis, penyesuaian strategi komunikasi sesuai dengan konteks zaman TIK jelas ditujukan demi mempertahankan serta memperbesar porsi kuasa yang dimiliki.

Satu hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam pembahasan mengenai munculnya gerakan relawan dan perubahan strategi politis dari parpol ialah kenyataan bahwa masyarakat pada era TIK ini memiliki daya tawar yang lebih kuat dari sebelumnya dalam ranah politis yang selama ini dianggap sebagai milik dari segelintir elite saja. Figur-figur penting lahir dari masyarakat lewat proses pengenalan yang terakselerasi oleh derasnya arus informasi. Para tokoh besar dapat seketika tamat kariernya oleh tangan tidak terlihat tetapi sangat berkuasa bernama jaringan yang dalam tempo singkat mampu menyebarkan berita tertentu kepada banyak orang di dalamnya. Dengan kata lain, inilah saatnya partisipasi masyarakat dapat menjelma menjadi sebuah sinergi positif dalam mendorong pejabat kompeten. Akan tetapi, partisipasi itu mungkin juga memperkeruh situasi politis karena akan terjadi segregasi masyarakat serta memunculkan kebuntuan berkepanjangan dalam kehidupan berdemokrasi. Fenomena itu terlihat, misalnya, dari penguatan politik identitas, khususnya yang terkait dengan latar belakang keagamaan, dan penyusupan kelompok ekstremis ke dalam instansi pemerintahan sebagai akibat dari keinginan kuat masyarakat agar figur politis mampu merepresentasikan identitas partikular mereka dan tidak hanya mengandalkan sistem meritokrasi sebagai rujukan elektoral. Lembaga Alvara Strategi Indonesia pada Oktober 2017 merilis survei yang menunjukkan bahwa terdapat 19,4% aparatur sipil negara (ASN) yang menyatakan ketidaksetujuan dengan Pancasila dan lebih percaya pada ideologi *khilafah* sebagai penggantinya.<sup>7</sup>

---

6 Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/12144241/tak-lolos-ke-dpr-psi-jadikan-pemilu-2019-modal-untuk-pemilu-berikutnya> yang diakses pada 7 Agustus 2019.

7 Dikutip dari <https://www.dw.com/id/pemerintah-belum-rencana-saring-pejabat-negara-yang-terindikasi-terpapar-radikalisme/a-49342971> yang diakses pada 7 Agustus 2019.



### 2.3 Demokrasi, Politik, dan Ruang Publik dalam Jaringan

Kendati kasus *Arab Spring* ataupun konstelasi politis di Indonesia merupakan dua hal yang berbeda jauh, ditinjau dari sebab dan akibatnya, keduanya berhasil memperlihatkan bagaimana media sosial yang menghubungkan banyak orang dalam jaringan yang luas dan langsung mampu menjadi faktor kunci dalam sebuah revolusi politis, khususnya demokratisasi. Memang, jika berkaca pada kenyataan di lapangan, pasti akan menemukan anomali sebagai bentuk deviasi fakta dari teori yang menjadi kerangka dalam membuat prediksi. Kedua kasus itu pun memilikinya, di luar apa yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu.

Pada kasus *Arab Spring*, misalnya, bagaimana mungkin media sosial sebagai salah satu instrumen hasil penggunaan TIK dapat berperan begitu penting dalam memobilisasi ribuan hingga jutaan manusia untuk berkumpul dan menyuarakan protes terhadap pemerintahnya sekaligus juga memperoleh akses pada berbagai ide tentang revolusi dan demokrasi sejati dari belahan dunia lain, bahkan ketika pengguna media sosial di semua negara yang mengalami *Arab Spring* jauh di bawah 20% saat itu (2011)?<sup>8</sup> Jika mengacu pada logika jejaring yang berlandaskan prinsip inklusivitas pada segala bidang kehidupan dan eksklusivitasnya pada mereka yang berada di luar jaringan, temuan ini seakan-akan adalah sebuah bentuk ketidaksesuaian antara teori dan fakta.

Kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Jumlah pengguna media sosial yang rendah di negara-negara tersebut justru menjadi faktor penting dalam memperbesar jumlah massa yang terlibat di dalam revolusi politis. Mengapa demikian? Sebabnya, jejaring sosial yang menghubungkan masyarakat negara-negara itu hanya dikuasai oleh segelintir orang yang juga melakukan oligopoli ide-ide yang mereka akses. Massa jauh di bawah 20% itu menjelma menjadi sumber tunggal untuk segala informasi yang dapat diakses oleh publik di sekitarnya. Kemungkinan beragam perspektif seperti ketika mayoritas anggota masyarakat memiliki akses pada media sosial menjadi sangat kecil, hampir-hampir tidak ada.

Ketika dikatakan bahwa pemerintah yang sekarang perlu digulingkan dengan cara-cara tertentu berdasarkan prinsip-prinsip revolusi tertentu, anggota masyarakat, terutama yang masih sangat agamis dan tradisional serta memandang bahwa perspektif yang ditawarkan sejalan dengan keyakinan mereka, akan serta-merta melakukan mobilisasi tanpa mencari perbandingan dari sumber lain. Castells dalam hal ini tepat ketika menyatakan bahwa masyarakat jejaring adalah sebuah ruang tunggal raksasa tempat logika mengenai keruangan yang terpisah-pisah serta waktu yang berjangka menjadi tidak relevan lagi. Berbagai pihak pada kasus *Arab Spring* bergerak cepat menindaklanjuti segala perkembangan informasi yang beredar tanpa kemampuan untuk menyaring informasi yang penting dan perlu disikapi, serta cara menyikapinya.

Itu juga yang menyebabkan sejumlah anomali yang sudah dipaparkan sebelumnya menjadi kompatibel ketika dilihat melalui pendekatan ini. Demokratisasi ekonomi yang tidak terlaksana sebagai efek samping menegaskan bahwa memang sejak awal masyarakat hanya berfokus pada revolusi politis semata. Mereka tidak menaruh perhatian pada upaya untuk melakukan desentralisasi dan distribusi modal secara merata dari golongan borjuis kepada proletar sehingga kapitalisme dapat melenggang bebas dan makin berkembang. Demikian pula dengan penggunaan ceramah-ceramah agama dan semangat islamisme yang dijadikan tali pengikat solidaritas masyarakat dalam revolusi politis menuju demokratisasi. Ia dapat menjadi sangat cocok karena masyarakat butuh simbol pemersatu yang kuat dan representatif jika ingin mengalahkan rezim oligarki yang disokong oleh kekuatan militer. Mereka butuh paham revolusioner yang mampu berdiri berseberangan dengan sistem yang hendak dilawan, sekaligus juga yang familiar dan dapat diterima oleh mereka. Sehingga

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://thenextweb.com/me/2011/08/25/discover-digital-arabia-middle-east-internet-usage-in-numbers/> yang diakses pada 24 Oktober 2017.

pada akhirnya, wajar jika kekacauan politis lanjutan dan kemerosotan ekonomi yang kian parah karena ketidaksiapan masyarakat luas dalam membangun sistem pengganti yang sepadan menjadi niscaya.

Ada semacam krisis eksistensial dalam fenomena tersebut, baik di kalangan mereka yang terhubung sebagai masyarakat jejaring di dalam sosial media, maupun mereka yang tidak terhubung. Kemampuan mereka menggulingkan pemerintahan yang otoriter secara tidak langsung menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi siapa pun. Yang kuat dapat dilemahkan, yang lemah dapat dikuatkan. Kuasa tersebar dan menjadi milik siapa saja yang mampu menggalang massa sebanyak mungkin, tidak hanya menjadi milik pemerintah negara saja. Hal ini tentunya mengaburkan perbedaan antara terma “penguasa” dan “yang dikuasai”. Apakah kemudian pemerintah yang menguasai masyarakat, ataukah masyarakat yang menguasai pemerintah?

Dampak dari pengaburan perbedaan tersebut dapat menjadi sangat fatal jika kemudian tiap kelompok kecil masyarakat memiliki visi dan desain yang berbeda-beda dalam menghadapi kekosongan itu. Masing-masing ingin memiliki identitas yang jelas di dalam revolusi menuju demokratisasi politik ini sehingga berusaha untuk mencari peran penting di dalamnya. Mereka, terutama yang sudah menjadi bagian dari masyarakat jejaring, tidak lagi mengutamakan keuntungan atau tatanan ideal bagi kebaikan orang banyak. Mereka berupaya mencari pengakuan di dalam jaringan itu sendiri atas andil mereka pada peristiwa besar itu. Jika kemudian kita berkaca kembali pada hakikat jejaring sosial yang menghubungkan individu dengan dunia, ketika keragaman memunculkan krisis identitas serta keinginan untuk tampil beda dan bukan homogenisasi atas perbedaan tiap individu, ditambah dengan kenyataan bahwa jejaring sosial ini adalah sebuah bentuk *space of flows* dan *timeless time*, dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah berlangsung sebagai sebuah pergumulan dalam kekacauan ruang dan waktu yang memampatkan segala kejadian dan orang dalam kebingungan. Revolusi berlangsung dan berdarah-darah sebab mayoritas masyarakat yang tidak memiliki akses pada media sosial hanya mengetahui sebatas apa yang disampaikan oleh mereka yang memiliki akses. Akibatnya, segala putusan dan tindakan yang akan menggerakkan mereka bergantung pada informasi yang parsial dan tersaring oleh kepentingan sang penyalur. Kendati demikian, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, kita tidak dapat serta-merta mengatakan bahwa masyarakat Arab bukan masyarakat jejaring karena unit dasar kehidupan mereka adalah komunitas, bukan individu.

Apakah kemudian Castells keliru memformulasikan konsep mengenai era masyarakat jejaring akibat temuan pada kasus *Arab Spring* ini? Jika kita memaknai apa yang disampaikan oleh Castells perihal era masyarakat jejaring sebagai kondisi tempat orang-orang terhubung dengan perangkat media sosial yang dimediasi oleh Internet, kita dapat saja secara tergesa-gesa mengafirmasi hal itu. Namun, jika kita melakukan pembacaan dengan lebih hati-hati tentang hal ini dan secara konseptual, era masyarakat jejaring adalah sebuah pergeseran semangat alih-alih cara berkomunikasi atau teknologi yang digunakan. Seperti yang ditekankan di awal, munculnya era masyarakat jejaring tidak dapat dilepaskan dari timbulnya kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya produksi informasi alih-alih materi. Produksi, konsumsi, dan distribusi informasi dari dan ke segala masyarakat dunia adalah apa yang dikejar. Media sosial yang dimediasi oleh Internet adalah sarana yang membantu kita mewujudkan tujuan besar ini. Dengan demikian, *Arab Spring* hendaknya dipandang sebagai dampak yang ditimbulkan ketika sirkulasi informasi mendapat keutamaan di atas sirkulasi materi.

Ketiadaan akses Internet bagi 80% lebih masyarakat negara-negara yang mengalami *Arab Spring*<sup>9</sup> tidak dapat dipandang sebagai gagalnya konsep Castells terkait *space of flows* dan *timeless times* untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Mereka, dengan kata lain, hanya tidak memiliki akses pada salah satu jenis

---

9 Dikutip dari <https://thenextweb.com/me/2011/08/25/discover-digital-arabia-middle-east-internet-usage-in-numbers/> yang diakses pada 24 Oktober 2017.

sumber atau perangkat informasi dan komunikasi (dalam hal ini Internet). Kita tidak boleh abai juga bahwa mereka tentunya masih mampu untuk mengakses informasi lewat perangkat TIK lainnya seperti televisi dan radio yang penyebarannya serta penggunaannya lebih inklusif daripada Internet (utamanya karena masyarakat tidak membutuhkan keterampilan operasional setinggi penggunaan Internet untuk dapat menggunakan kedua contoh perangkat itu dalam rangka memperoleh informasi).

Televisi dan radio memang bukanlah barang baru pada awal-awal kemunculan era masyarakat jejaring, sebab keduanya telah cukup lama digunakan sebagai media informasi dan komunikasi oleh masyarakat dunia, terutama pada periode 1940–1950. Namun, kendati teknologi yang digunakan sama seperti era sebelum masyarakat jejaring, terdapat setidaknya dua fitur penting yang bersifat immateril dalam konteks penggunaan kedua teknologi ini oleh masyarakat Arab pada kasus *Arab Spring*. Kedua fitur ini, sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, adalah semangat informasionalisme yang menggantikan orientasi materialisme peradaban serta cara pandang globalistik sebagai akibat dari hadirnya era globalisasi yang menghubungkan masyarakat dunia dari segala penjuru. Sementara fitur pertama berperan dalam menanamkan arti penting produksi, distribusi, dan konsumsi informasi di atas materi dalam benak masyarakat Arab yang mengalami *Arab Spring*, fitur kedua mendorong timbulnya kesadaran yang lebih luas mengenai keberadaan dunia di luar dataran Arab yang memiliki kekayaan informasi yang tidak dimiliki mereka. Oleh karena itu, kendati teknologinya relatif tidak banyak berubah, terjadi perubahan pola pikir yang menyebabkan cara masyarakat Arab mengoperasikan teknologi itu menjadi berubah pula.

Di samping itu masyarakat Arab yang tidak memiliki akses Internet juga sebetulnya masih memiliki kuasa untuk menentukan apakah mereka hendak memercayai suatu informasi dan bertindak atasnya atau tidak. Jika kemudian dikatakan bahwa mereka berada pada posisi yang pasif karena hanya menerima informasi secara pasrah, hal yang sama dapat saja terjadi pada pengguna Internet. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam mayoritas kasus, yang terjadi adalah para pengguna TIK, khususnya Internet, tidak menggunakan daya kritis mereka secara optimal dalam menghadapi gempuran informasi sehingga tidak heran mereka terkesan seperti pengguna pasif yang mudah dikendalikan dan tidak bebas dalam bertindak.

Lebih lanjut, gagalnya sebagian masyarakat Arab untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka peroleh (baik secara terbatas maupun secara bebas) dapat dikatakan merupakan hasil yang nyaris tidak terelakkan dari kondisi masyarakat Arab itu sendiri. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, masyarakat Arab merupakan tipikal masyarakat yang disusun atas komunitas atau kelompok yang memiliki identitas tertentu sebagai unit dasar yang membangunnya. Selain itu, masyarakat Arab juga memiliki keterikatan yang cukup kuat pada nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang pada praktiknya dijadikan pedoman dasar dalam bertindak. Kombinasi keduanya berdampak pada rendahnya daya kritis masyarakat Arab sebab kritisisme adalah sesuatu yang memang tidak didorong untuk tumbuh subur oleh kedua hal tersebut. Melalui keduanya, sebaliknya, masyarakat Arab dibiasakan untuk tunduk patuh menjalankan semua yang hal yang sudah diatur secara formal.

Beralih pada konstelasi politis di Indonesia, munculnya gerakan relawan yang mampu memajukan calon-calon dari luar parpol ke dalam kontestasi Pemilu serta perubahan strategi kaderisasi dan penggalangan dukungan yang dilakukan oleh berbagai parpol tidak hanya menunjukkan bahwa telah tumbuh semacam kesadaran untuk menggunakan TIK dan memberi ruang lebih kepada generasi muda dalam berpartisipasi aktif di kancah politis. Tren ini juga tidak terbatas hanya pada peningkatan posisi tawar masyarakat pada ranah politis. Lebih dari itu, fenomena ini dapat saja menunjukkan pertanda bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat jejaring yang aktif memantau dan melekat terhadap situasi politis, semakin pudar pula garis batas pembeda antara publik dan pejabat publik. Selain dikarenakan siapapun kini dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain berkat publikasi di media sosial, keinginan masyarakat untuk memiliki peran

dalam dunia politis di negeri ini telah memampukan mereka dalam memberi tekanan kepada para pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Sama seperti pada kasus *Arab Spring*, menjadi tidak jelas siapa yang memengaruhi siapa dan siapa yang menjadi siapa.

Berbeda dengan apa yang terjadi pada *Arab Spring*, cukup banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke dalam jaringan media sosial, dan oleh karenanya tersaji cukup banyak perspektif untuk dipilih dalam memandang sebuah persoalan politis. "Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017" yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada 2017 terdapat 143,26 juta jiwa masyarakat yang memiliki akses Internet dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa. Angka ini setara dengan 54,68%.<sup>10</sup> Memang benar bahwa banyaknya perspektif tentunya berpengaruh pada banyaknya jumlah kelompok di tengah masyarakat yang membuat lebih riskan untuk terjadi konflik kapan pun. Namun, justru dengan terdistribusinya massa secara merata ke banyak kelompok sudut pandang, tiap orang menjadi lebih berhati-hati, terutama dalam memutuskan kapan harus terang-terangan berkonflik fisik. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa besarnya jumlah pengguna media sosial menjadi kurang efektif dalam penyebaran informasi yang berimbang karena sebagian besar pengguna itu sendiri terkonsentrasi di pusat-pusat kemajuan macam Pulau Jawa (menilik pada kenyataan bahwa selain karena 60% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, pembangunan pun selama ini lebih banyak terfokus di Pulau Jawa sehingga wajar apabila muncul jurang ketimpangan yang sangat besar dalam hal infrastruktur, teknologi, dan perekonomian dengan wilayah lain di Indonesia). Daerah-daerah yang berada jauh dari pusat kemajuan dan memiliki lebih sedikit pengguna media sosial akan lebih berisiko terkena kejadian oligopoli informasi seperti halnya di Timur Tengah.

Hal berikutnya yang tidak kalah penting untuk dipahami yakni pembiasaan dari identitas politis itu sendiri. Parpol kini berubah menjadi perkumpulan yang sangat pragmatis dan kurang merepresentasikan golongan tertentu seperti yang terjadipada masa Orde Baru saat kekuatan politis dipecah ke dalam tiga kubu: Golkar, PDI, dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dewasa ini, apa yang penting adalah bagaimana meraih sebanyak mungkin dukungan, bukannya upaya untuk mewakili ideologi tertentu. Jika memajukan calon tertentu atau mengusulkan kebijakan tertentu dapat memberi peningkatan kepada elektabilitas parpol, maka sekalipun keputusan ini berlawanan dengan ciri kepartaian, akan tetap dilaksanakan. Ambil contoh, misalnya, dari bagaimana PKS sebagai parpol yang bernuansa islami nyatanya memajukan calon dari golongan agama non-Islam pada sejumlah kontestasi Pilkada serentak di daerah Indonesia Timur yang memang pemilihnya lebih banyak yang berasal dari agama non-Islam.<sup>11</sup>

Selain pragmatisme yang didorong oleh semangat populisme terhadap aspirasi masyarakat yang tersalurkan salah satunya lewat jejaring media sosial, dinamika dalam proses pembentukan kubu yang berkoalisi serta berposisi dengan parpol penguasa pun berjalan lebih cair dari sebelumnya. Kawan koalisi dapat menjadi pihak penentang dalam proses pengambilan kebijakan oleh parpol penguasa eksekutif, sebaliknya lawan dari oposisi dapat juga tiba-tiba menjadi pihak yang mendukung. Musuh kemarin adalah kawan hari ini, begitu juga sebaliknya. Semua ini sekali lagi dipengaruhi cukup signifikan oleh peran media sosial dalam menyuarakan tekanan dari masyarakat jejaring dan nonjejaring kepada parpol sebagai tonggak demokrasi, di samping juga konsekuensi yang ditawarkan dalam tiap opsi pengambilan keputusan.

Tentu tidak dapat ditampik bahwa pragmatisme politis adalah sesuatu yang sudah selalu terjadi sepanjang masa, terutama dalam konteks semangat populisme. Namun, baru semenjak munculnya era masyarakat jejaringlah masyarakat betul-betul memiliki daya untuk menentukan nasib para politikus lewat

10 Dikutip dari [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf) yang diakses pada 7 Agustus 2019.

11 Dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39024345> yang diakses pada 29 Oktober 2017.

mekanisme kontrol yang menjadi fitur utamanya. Misalnya dalam kasus Pilkada 2018, ketika sejumlah parpol memutuskan untuk berkoalisi kendati dalam sejarahnya pada level elite di tingkat pusat memiliki hubungan yang buruk. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, Partai Gerindra dan PKS memutuskan untuk merapat dengan PDIP untuk mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Sementara itu pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Partai Demokrat memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.<sup>12</sup> Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan tiap parpol tentang elektabilitas dari masing-masing calon yang tersedia, yang tentunya berakar dari opini masyarakat yang direpresentasikan dalam berbagai survei yang disebarluaskan melalui media sosial. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa opini masyarakat memiliki daya tawar yang begitu tinggi sampai-sampai parpol-parpol yang memiliki hubungan yang buruk sekalipun mau untuk berkoalisi demi dapat berkesesuaian dengan keinginan masyarakat.

Sulit untuk membuat publik buta terhadap apa yang terjadi sebab informasi dapat disebarkan oleh siapapun. Politikus mau tidak mau harus lebih akomodatif terhadap apa yang menjadi kehendak rakyat sambil waspada akan setiap tindak-tanduknya karena masyarakat akan selalu menilai tanpa henti, di mana saja dan kapan saja, perilaku dan keputusan politis yang mereka buat. Di lain pihak, secara jangka panjang tentu masyarakat akan mengalami semacam kebingungan pula mengenai perannya sebagai pengontrol kinerja para pejabat dan politikus. Dengan melihat pada begitu asalnya kritik dilahirkan oleh berbagai kalangan di dalam masyarakat, dengan gaya seolah mereka betul-betul paham apa yang terjadi dan bagaimana hal itu seharusnya terjadi, mereka gagal untuk menempatkan diri secara tepat sebagai pengawas dan malah tenggelam dalam imajinasi mereka sendiri sebagai pejabat publik atau politikus.

Lahirnya *hoax* yang mengejutkan dalam berbagai black campaign merupakan salah satu contoh bagaimana sebagian masyarakat gagal menempatkan diri mereka secara tepat sebagai pengawas dari para pejabat publik. Kuskridho Ambardi, pakar komunikasi dari Universitas Gajah Mada, melihat bahwa perilaku pengguna media sosial dalam berselancar dan berinteraksi dalam dunia maya ditentukan oleh pilihan politis mereka. Para pengguna media sosial mencari media yang dirasa cocok dengan pandangannya dan memberikan tanggapan (yang disirkulasikan di media sosial) yang cenderung bersifat monologis alih-alih dialogis.<sup>13</sup> Hal ini pada akhirnya menjadi awal bagi kemunculan kritik yang serampangan dan imajinasi yang berlebihan serta tanpa pertimbangan yang matang.

Satu hal penting lainnya yang dapat ditarik sebagai kesamaan mendasar antara dua kejadian berbeda ini di samping krisis eksistensial yang melanda orang-orang di dalam jaringan adalah potensi munculnya model ruang publik lintas teritori, suku, ras, hingga kebangsaan yang tidak hanya mewujud sebagai sebatas perkumpulan informal tempat terjadinya perkumpulan informasi dan inovasi, melainkan juga sebagai kekuatan baru berskala nasional dan/atau internasional yang mampu memberi pengaruh pada banyak bidang kebijakan publik yang seharusnya menjadi domain penuh otoritas penguasa. Ruang publik ini amat fleksibel, ditandai dengan perpindahan anggota yang amat dinamis. Kemunculan *non-governmental organization* (NGO) seperti "Greenpeace" dan "Transparency International" merupakan contoh yang unik (Margono 2015, 106). Selain karena pengaruh keduanya pada kebijakan suatu negara ("Greenpeace" mengawasi kegiatan penebangan di Indonesia, sementara laporan yang dibuat oleh "Transparency International" telah dijadikan acuan warga negara Indonesia untuk menumbangkan pejabat publik yang terindikasi melakukan korupsi), mereka yang menjadi anggota dari kedua NGO itu dapat berasal dari negara yang secara internasional tidak

---

12 Dikutip dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/140536-pragmatisme-parpol-demi-kemenangan> yang diakses pada 15 Agustus 2019.

13 Dikutip dari <https://www.tempo.co/abc/3454/pilihan-politik-pengaruh-perilaku-bermedsos-netizen-indonesia> yang diakses pada 15 Agustus 2019.

memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang diawasi (dalam kasus yang lebih ekstrem, mereka yang berasal dari negara yang diawasi pun dapat sekaligus juga menjadi anggota NGO yang mengawasi). Jika ia terus berlangsung, bukan tidak mungkin demokrasi sendiri akan berevolusi menjadi sebuah kontestasi dalam jaringan yang melibatkan lebih banyak pihak dari sebelumnya, bahkan mereka yang seharusnya tidak mempunyai wewenang seperti halnya warga negara lain. Interdependensi kepentingan akan menjadi motor pendorong utama bagi keterlibatan semacam ini.

Semangat transnasionalisme tersebut diterjemahkan melalui aktivitas pihak non-negara dalam perpolitikan internasional yang kini dirasakan sangat berpengaruh dalam membentuk isu yang menjadi fokus perhatian masyarakat dunia. Rocky Gerung melihat bahwa kepemimpinan tidak mewujudkan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan oleh lembaga formal bernama negara. Sinisme terhadap model demokrasi lama telah mendorong lahirnya model demokrasi baru yang memiliki isu sentral berupa upaya menghadirkan keadilan sosial (Gerung 2017, 179–183). Jika pada model demokrasi lama terdapat pembatasan individu yang dapat berpartisipasi secara demokratis pada suatu isu (yakni orang yang menjadi anggota suatu negara, provinsi, kota, atau sejenisnya secara teritorial dan administratif), pada model demokrasi yang baru, aktor-aktor nonnegara dan ketiadaan pusat menjadi ciri khasnya.

Perkembangan media sosial dan populasi masyarakat jejaring yang berlangsung eksponensial kini tidak lagi sekadar menghubungkan orang banyak atau menjadi motor penggerak dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak pula ia menjadi sekadar sarana untuk menyalurkan kritik dan saran kepada lingkungan sosial dan institusi tertentu. Lebih dari itu, ia telah menjelma sebagai instrumen penting dalam merekonstruksi ruang publik menjadi arena pertarungan dan unjuk kekuatan politis tempat tiap-tiap pihak ingin menjadi pemain sekaligus pengawas kritis yang pada akhirnya justru membuat mereka gagal menempatkan diri dengan baik dan malah memunculkan kekacauan berkepanjangan karena populisme atas nama demokrasi justru menutup ruang bagi bekerjanya akal sehat dan pertimbangan yang matang dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini terlihat pada contoh kasus Pilkada 2018 yang dibahas di atas. Perbedaan pandangan yang jumlahnya begitu banyak dari segala penjuru yang berkepentingan dipertemukan dalam sebuah panggung virtual besar yang tujuan akhirnya adalah memperlihatkan pihak mana yang mampu mendominasi, bukan menunjukkan suatu kebenaran objektif. Jika kita kemudian mengikuti alur berpikir yang ditawarkan oleh Castells dalam konteks masyarakat jejaring, mustahil bagi perbedaan pandangan yang begitu banyak ini untuk disamakan, sebab pada saat bersamaan, dari perbedaan ini pulalah tiap kelompok mendapatkan identitas uniknya. Upaya untuk menyatukan pandangan lewat jalan mengeliminasi pandangan-pandangan lain justru membuat tiap pemilik pandangan itu semakin kukuh dengan apa yang diyakininya.

Ketiadaan kepala yang sejati sebagai pusat informasi dan komando dalam masyarakat jejaring tercermin dari munculnya pusat-pusat informasi yang saling bergantung pula pada keberadaan satu sama lain. Hal ini terlihat, misalnya, dari lahirnya jurnalisme warga yang dikirimkan oleh berbagai lapisan masyarakat yang tidak selalu memiliki latar belakang jurnalisme sebagai tandingan atas keberadaan jurnalisme konvensional atau media massa yang mengalami krisis kepercayaan dari publik semenjak 1988 akibat arogansi yang muncul di kalangan media massa terkait masalah yang menjadi perhatian masyarakat (Kurniawan 2007, 71–72). Temuan ini mengartikan bahwa informasi bukan lagi menjadi hak monopoli media massa saja, melainkan juga menjadi hak setiap anggota masyarakat untuk memproduksi dan mendistribusikannya.

Ditambah dengan kenyataan bahwa seseorang bisa saja tergabung dalam dua atau lebih jaringan, maka posisi hierarki antarindividu berpotensi menjadi kabur dan tidak jelas. Dalam kasus konflik nilai yang melibatkan nilai-nilai demokrasi dan Islam pada kasus *Arab Spring*, misalnya, ketidakjelasan posisi hierarkis paling dirasakan oleh kaum wanita yang selama ini banyak mengalami pengekan pada ranah pergaulan di masyarakat atas nama keyakinan agama mereka (Isfironi 2013, 27). Jika kemudian transformasi ruang

publik yang hadir akibat masuknya gagasan mengenai demokrasi secara deras melalui media sosial di saat bersamaan juga makin memantapkan nilai-nilai sekularisme di tengah masyarakat Arab, khususnya kalangan wanita, maka boleh jadi masyarakat akan dipaksa untuk memilih salah satu di antara nilai Islam atau nilai demokrasi yang hendak dijadikan pedoman hidup secara individu maupun sosial. Tidak tertutup kemungkinan karena hal itu, akan muncul konflik berkepanjangan hingga tercapai titik kesetimbangan yang baru. Boleh jadi dalam bentuk penyepakatan bentuk negara yang baru atau mungkin lahirnya negara baru. Semua masih terbuka lebar hingga sampai pada titik ini, apalagi jika berkaca pada konflik di sejumlah negara Arab yang hingga kini belum tuntas. Tentu dapat juga terjadi hal sebaliknya ketika kita berkaca pada kenyataan bahwa hingga saat ini perbedaan kelas masih ada dan malah kian melebar antara elite dengan masyarakat. Namun, apakah pertentangan kemudian dapat menghambat atau memperlancar kinerja serta kondisi demokrasi di Indonesia, semua bergantung pada apa yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia di ujung pergumulan itu.

### 3. KESIMPULAN

Media sosial sebagai bentuk transformasi ruang publik yang pada akhirnya membentuk komunitas raksasa bernama masyarakat jejaring yang terintegrasi secara global dalam kemampatan dunia menjadi sebuah ruang besar yang mengalirkan deras arus informasi secara langsung tanpa jeda waktu dan hampir tanpa proses merupakan sebuah perkembangan yang niscaya pada era informasionalisme yang berpusat pada pengembangan TIK. Perubahan dan inovasi melaju serta berakselerasi hari demi hari, hingga pada akhirnya manusia makin tidak memiliki jeda untuk menghela nafas dalam mengejar dan membiasakan diri dengan lajunya. Di dalam dunia yang dikatakan sebagai *space of flows* dan *timeless time* oleh Manuel Castells ini, keseluruhan dari keberagaman manusia di seluruh dunia dibenturkan, tidak untuk menyeragamkan semuanya, tetapi untuk memperkaya jaringan besar ini dengan variasi corak yang hendak ditonjolkan masing-masingnya.

Masyarakat yang kini terhubung dalam jaringan telah memunculkan satu poros kekuatan baru di dalam dunia demokrasi. Untuk pertama kalinya, masyarakat mampu memiliki daya dalam menekan rezim penguasa yang dinilai melenceng dari kehendak mereka menuju kehancuran sebagaimana yang dialami oleh para penguasa otoriter di negara-negara Arab yang mengalami peristiwa *Arab Spring*, mampu memengaruhi sikap politis dari parpol yang selama ini merupakan salah satu pilar penting demokrasi dalam melahirkan kader-kader yang menduduki jabatan publik, serta mampu berdiri secara mandiri sebagai sebuah komunitas lintas negara yang aktif memengaruhi kebijakan semua negara di dunia melalui masifnya jumlah mereka. Era masyarakat jejaring memungkinkan masyarakat untuk melawan rezim otoriter: selain karena pada era ini penggalangan massa dari dalam masyarakat tertentu dapat dilakukan melalui sambungan jaringan ke segala pelosok negeri, hadirnya jaringan yang mentransmisikan informasi ke luar negeri juga memungkinkan timbulnya *transnational activism* yang dipelopori oleh masyarakat dunia yang kemudian mampu memberikan tekanan pada rezim yang sedang dilawan.

Lebih lanjut lagi, dapat dikatakan bahwa masyarakat bukan lagi penonton atau sekadar pemilih yang kehadirannya tidak lagi signifikan ketika masa Pemilu telah usai, sebab kini setiap dari mereka sekaligus juga merupakan pemain yang dapat berpindah kelas secara dinamis dan cepat dengan mengandalkan kekuatan publikasi media sosial. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi elite yang telah mapan sebab akan lahir kompetitor-kompetitor baru dalam kontestasi demokrasi pada masa depan. Oleh karena itu, menjadi sangat wajar apabila para elite pun menggunakan sarana yang sama dalam melanggengkan kekuasaannya melalui serangkaian pencitraan yang tercermin pada setiap iklan, program sosial dan ekonomis, serta konstruksi

identitas. Di samping itu, kaum elite juga dibuat lebih terbuka terhadap apa yang didengungkan masyarakat pada tataran akar rumput sebab reputasi dan karier politis mereka amat bergantung pada kesesuaian antara tindakan dan keputusan politis yang mereka buat dengan apa yang masyarakat kehendaki.

Dari serangkaian gejala tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokratisasi pada masa yang akan datang akan mendapat peluang sekaligus tantangan di dalam pertumbuhan dan proses revolusinya. Dikatakan peluang, sebab partisipasi publik dalam menonton maupun bermain di dalam dunia politis yang demokratis telah mendorong lahirnya lebih banyak birokrat dari rahim masyarakat biasa yang membuat kuasa terdifusi dan tidak hanya menjadi hak oligopolis sejumlah elite. Politik pun bukan sekadar berarti memiliki jabatan formal di dalam lembaga kenegaraan dan publik sebab komunitas di dalam jaringan virtual bernama media sosial pun ternyata dapat sekuat lembaga resmi dalam demokrasi akibat potensi pertumbuhan massa dan pengaruhnya yang tidak dapat dianggap remeh. Maka, dari sini, sebuah bentuk keseimbangan baru dalam sistem yang saling mengawasi berpotensi lahir, dengan lembaga legislatif sekalipun kini dapat diawasi kinerjanya oleh masyarakat jejaring yang mempunyai kekuatan nyata dalam memberi tekanan publik.

Namun, di balik peluang yang menjanjikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas, tersembunyi tantangan yang harus segera dihadapi dalam perkembangan proses demokratisasi era digital ini. Tantangan itu terkait dengan kemungkinan terjadi pembiasan distingsi antara negara, elite, serta masyarakat umum. Di sini juga akan muncul apa yang disebut krisis eksistensial dan identitas sebagai sebuah bentuk pencarian manusia atas peran yang hendak dimainkan di dalam kesatuan ruang besar bernama dunia ini, berikut apa cara pandangnya atas dunia yang sama. Pada tahap pencarian itulah lahir beraneka cita-cita dan tujuan yang akan bertarung dalam pergulatan tanpa akhir menuju dominasi dan perwujudan ego tiap golongan yang berkepentingan. Menarik untuk menunggu apakah insting saling sikut dalam mewujudkan dan menurunkan desain golongan pada dunia saat ini dan pada masa depan akan dituruti begitu saja oleh tiap golongan yang berkontestasi, atukah akan ada upaya untuk mengubah tendensi ini menjadi semangat untuk bersinergi dalam mendewasakan struktur kelembagaan di dalam masyarakat demokratis.

## DAFTAR REFERENSI

- Baechler, J. 2001. *Demokrasi: Sebuah Tinjauan Analitis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bortel, G. v., dan Mullins D. 2009. Critical Perspectives on Network Governance in Urban Regeneration, Community Involvement and Integration. *Journal of Housing and the Built Environment* 24, no. 2 [Juni]: 203–219.
- Castells, M. 2005. The Network Society: From Knowledge to Policy. Dalam *The Network Society: From Knowledge to Policy*, penyunting oleh Manuel Castells dan Gustavo Cardoso, 3–22. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
- \_\_\_\_\_. 2010 [1996] *The Rise of Network Society*. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
- \_\_\_\_\_. 2010. Towards a Sociology of the Network Society. *Contemporary Sociology* 29, no. 5 [September]: 693–699.
- Csomós, G. 2013. The command and control centers of the United States (2006/2012): An analysis of industry sectors influencing the position of cities. *Geoforum* 50: 241–251.
- Curtin, M. dan Sanson, L. 2016. *Precarious Creativity: Representation and Demography*. California: University of California Press.
- Curtis, S. 2011. Global Cities and the Transformation of the International System. *Review of International Studies* 37, no. 4 [Oktober]: 1923–1947.
- Eisenstadt, S. N. 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.



- Falahi, Z. 2012. Prospek Regionalisme Timur-Tengah Pasca-Arab Spring: Telaah terhadap Identitas Kolektif Liga Arab. *Jurnal Kajian Wilayah* 3, no. 2: 189–205.
- Gerung, R. 2017. Pasifikasi Aktivisme. *Prisma* 36, no. 1: 179 –183.
- Hermann, C. 2006. Laboring in the Network. *Capitalism Nature Socialism* 17, no. 1: 65–76.
- Isfironi, M. 2013. Perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Etnografi Perilaku dan Pengendalian Seksual. *al-'Adâlah* 16, no. 1 [Mei]: 25–38.
- Kurniawan, M. N. 2007. Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya. *Makara, Sosial Humaniora* 11, no. 2: 71–78.
- Margono. 2015. Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 [Agustus]: 105–110.
- Mustofa, A. 2013. Peran Media Massa sebagai Sarana Iklan Politik Parpol (Kajian terhadap Kasus Surya Paloh dan Partai Nasdem. *Jurnal Interaksi* 2, no. 1 [Januari]: 62–69.
- Novandi, B. 2013. Dampak Fenomena Arab Spring terhadap Pemerintahan Lebanon 2011-2013: 1–11.
- Ritaudin, M. S. 2016. Fenomena Teman Ahok Menghangatkan Politik Partai. *Jurnal TAPI's* 12, no. 2 [Juli–Desember]: 30–56.
- Rózsa, E. N. et al. 2012. The Arab Spring: Its Impact on the Region and on the Middle East Conference. *Academic Peace Orchestra Middle East - Policy Brief*, no. 9/10 [Agustus]: 1–20.
- Sheppard, E. 2002. The Space and Times of Globalization: Place, Scale, Networks, and Positionality. *Economy Geography* 78, no. 3 [Juli]: 307–330.
- Skippington, P. 2016. *Harnessing the Bohemian*. Canberra: ANU Press.
- Torfason, M. T. dan Ingram P. 2010. The Global Rise of Democracy: A Network Account. *American Sociological Review* 75, no. 3 [Juni]: 355–377.
- Umar, A. R. M. et al. 2014. Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena 'Arab Spring' dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 2 [November]: 114–129.
- Urry, J. 2011. Social Networks, Mobile Lives and Social Inequalities. *Journal of Transport Geography*, 24–30.
- Winseck, D. 2017. The Geopolitical Economy of the Global Internet Infrastructure. *Journal of Information Policy* 7: 228–267.
- Yasmine, S. E. 2015. Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 18, no. 2: 106–113.